



KONTESTASI DISKURSUS KETAHANAN PANGAN DAN PEMBENTUKAN KUASA PENGETAHUAN PEREMPUAN PADA KELUARGA PETANI SAWAH DI SUMATERA SELATAN

Yunindyawati¹✉, Titik Sumarti², Soeryo Adiwibowo², Aida Vitayala S. Hubbeis², Hardinsyah²

¹ Universitas Sriwijaya, Mahasiswa S3 Pascasarjana IPB

² Institut Pertanian Bogor

Permalink/DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/komunitas.v6i1.2952>

Article History

Received : Desember 2013
Accepted : Januari 2014
Published : Maret 2014

Keywords

discourse, food security, farmers family, women

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji diskursus ketahanan pangan antaraktor dan pembentukan kuasa pengetahuan perempuan pada keluarga petani sawah lebak di Kecamatan Pemulutan Selatan kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan paradigma konstruktivistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga aktor utama dalam diskursus ketahanan pangan yakni pemerintah, komunitas dan pelaku usaha. Masing-masing aktor berupaya mempraktikkan diskursusnya pada keluarga petani. Pada saat mempraktikkan diskursus terjadi interaksi diskursus antaraktor yang bersifat sinergis. Namun diskursus yang paling dominan dipraktikkan oleh keluarga adalah diskursus komunitas, sementara diskursus pemerintah sebagai pelengkap dan diskursus pelaku usaha sebagai pendorong. Pembentukan kuasa pengetahuan perempuan oleh para aktor bersifat elastis dan terdapat perbedaan akses dalam pembentukan kuasa pengetahuan perempuan berdasarkan perbedaan kelas sosial.

CONTESTATION OF FOOD SECURITY DISCOURSES & WOMEN POWER KNOWLEDGE FORMATION IN FARMER HOUSEHOLD IN SOUTH SUMATERA

Abstract

This study was to examine food security discourse between actors in the farmers family and the formation of the power of women's knowledge. The method used was a qualitative method using constructivism paradigm. Research findings indicate that there were three main actors in the discourse of food security namely the government, community and business. Each attempt to practice their discourse on family farmers. It turns out that in practice this discourse, there were interaction between actors in synergy. But the most dominant discourse was discourse of community that practiced by the family while the government discourse as a supplement and entrepreneurs discourse as a spur. Formation of the power of women's knowledge by actors were flexibles/elastics and there were differences acces of formation in power of women's knowledge between women in different social classes.

© 2014 Universitas Negeri Semarang

✉ Corresponding author :
Address: Sosiologi FISIP Universitas Sriwijaya
Jl. Palembang Prabumulih km 32 Indralaya Ogan Ilir
E-mail : yunin.unsri@gmail.com

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan adalah sebuah ide dinamis yang telah mengalami transformasi signifikan dari waktu ke waktu. Pada era tahun 1970an hingga 1990an studi ketahanan pangan menekankan pada level makro ekonomi menyangkut ketersediaan pangan. Kemudian terjadi dinamika dalam memahami ketahanan pangan yang mendorong pergeseran dari paradigma level makro ekonomi menuju level mikro ekonomi. Karena itu pembangunan berhubungan dengan ekonomi, pertanian dan ketahanan pangan yang difokuskan pada rumah tangga sebagai unit analisis bagi desain, perencanaan, implementasi serta intervensi evaluasi. Fokus pada rumah tangga didasarkan pada asumsi bahwa rumah tangga sebagai unit yang homogen memiliki kesamaan akses untuk mendapatkan pangan, dan sumber daya lainnya, meskipun konsep rumah tangga yang homogen ini banyak dipertanyakan terutama dari aspek empiris dan teoritis (Nanama et al., 2012).

Selanjutnya studi kontemporer mencoba menunjukkan sejumlah bukti empiris tentang pentingnya masyarakat dalam hasil pangan, telah mendorong perhatian pada masyarakat, pengetahuan dan persepsi lokal, meskipun kurang disertai teori sosial yang bisa memberinya kedalaman dan koherensi *cross-contextual*. Sementara literatur *livelihoods* berusaha mempertimbangkan aspek social bagi pemenuhan pangan dan hasil penghidupan, namun belum juga menunjukkan sebuah alat sistematis bagi pendekatan masyarakat dalam studi mereka. Literatur kontemporer ketahanan pangan memusatkan peran masyarakat dalam hasil pangan ditelusuri secara induktif dari sebaran strategi *livelihoods* dan hubungannya pada konteks tertentu. Akibatnya literatur ketahanan pangan kontemporer belum diarahkan bagaimana masyarakat dipahami secara produktif bagi kondisi biofisik/ekonomi dalam studi sistematis tentang hasil pangan (Carr, 2005).

Tulisan Carr (2005) mengidentifikasi sebuah alat pendekatan sistematis bagaimana memahami faktor-faktor kompleks dan negosiasi aktor yang berhubungan dengan

pangan dengan penerapan teori-teori *post modernism* dari kekuasaan dan pengetahuan untuk mempelajari peran masyarakat dalam hasil pangan. *Review* singkatnya menunjukkan bagaimana ketahanan pangan telah mengalami evolusi secara konseptual dengan ketidakhadiran sebuah pertimbangan serius dari dinamika social. Carr kemudian mempertimbangkan kontribusi potensial teori *postmodern* dalam pendekatan literatur ketahanan pangan dari beberapa teori untuk memahami masyarakat dan hasil pangan dengan mengacu pada aspek teori *postmodern* dari Foucault, tentang hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan.

Diskusi hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan dalam masyarakat, membolehkan kreasi dari pendekatan yang sudah umum bagi ketahanan pangan untuk menyelesaikan dua tujuan penting. Pertama, sebuah fokus pada hubungan antara kekuasaan dan masyarakat membolehkan kita mengintegrasikan masyarakat, khususnya persepsi dan pengetahuan lokal, dan kondisi biofisik/ekonomi dalam suatu cara yang keduanya merupakan mata rantai yang menghubungkan antara keadaan sosial material dan strategi mata pencaharian/keputusan. Kedua, dengan memfokuskan pada konteks sosial di mana kekuasaan dibentuk dan diproduksi, pendekatan ini membuat beberapa kompleksitas yang dapat dimengerti dan dibandingkan dengan konteks lain. Carr menyimpulkan dengan sebuah diskusi tentang studi ke depan/mendatang bisa memperluas pendekatan *postmodern* untuk memahami hasil pangan.

Menindaklanjuti pendekatan yang dikemukakan oleh Carr, maka penelitian ini memfokuskan pada diskursus ketahanan pangan antaraktor dan pembentukan kuasa pengetahuan perempuan dalam ketahanan pangan keluarga di Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan.

Propinsi Sumatera Selatan merupakan propinsi yang memiliki lahan rawa lebak cukup besar yaitu mencapai 2,98 juta ha. Dari jumlah tersebut yang sudah dimanfaatkan sebanyak 368.690 hektar terdiri dari 70.908 hektar lebak dangkal, 129.103 hektar

lebak tengahan dan 168.67 hektar lebak dalam (Noor, 2007, Yunita, 2011). Lahan lebak sangat potensial untuk pertanian terutama tanaman pangan. Dua kabupaten yang memiliki luas lahan terbesar adalah Ogan Komering Ilir (27,8%) dari total lahan lebak di Sumatera Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir (20,6%) dari total lahan lebak di Sumatera Selatan. Lahan Rawa lebak dimanfaatkan untuk berbagai jenis pertanian.

Musim tanam padi di sawah lebak hanya setahun sekali yakni pada saat air surut. Dengan hanya sekali setahun maka produktivitas hasil pertanian padi tentunya berbeda dengan sawah padi dengan pengairan. Kondisi ini membuat petani sawah lebak berada pada posisi sulit untuk menuju ketahanan pangan keluarga. Ditambah lagi perubahan iklim yang relative tidak menentu memberi dampak pada usaha pertanian sawah lebak. Hal tersebut bisa menyebabkan kerawanan pangan keluarga petani padi sawah lebak. Untuk mengatasi persoalan kerawanan pangan ini Badan Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian telah melakukan penyuluhan pertanian sebagai upaya pemberdayaan petani. Namun faktanya, berbagai kegiatan tersebut belum menunjukkan hasil yang nyata bagi ketahanan pangan keluarga. Hasil penelitian Yunita (2011) menunjukkan bahwa ketahanan pangan rumah tangga petani padi sawah lebak termasuk dalam kategori rendah.

Dampak dari rendahnya ketahanan pangan ini, paling berat dialami perempuan karena selama ini perempuan dikonstruksikan sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap pangan keluarga dan pekerjaan reproduktif lainnya. Konstruksi sosial semacam ini di satu sisi berakibat pada ketidakadilan gender di mana perempuan yang akan disalahkan jika tidak terpenuhi kebutuhan pangan keluarga. Di sisi lain, dengan konstruksi semacam ini perempuan berpeluang untuk memiliki pengetahuan dan kekuasaan di ranah pangan keluarga. Kondisi ini terjadi tidak terlepas dari peran wacana ketahanan pangan dan pembentukan kuasa pengetahuan yang dilakukan oleh aktor-aktor yang melingkupi kehidupan perempuan; seperti pemerintah (baik desa, kecamatan

bahkan kabupaten dan propinsi), komunitas dan pelaku para usaha.

Berangkat dari kenyataan tersebut, penelitian ini mengkaji bagaimana diskursus antaraktor dan pembentukan kuasa pengetahuan perempuan dalam ketahanan pangan keluarga. Untuk membuat lebih terinci maka rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana kontestasi diskursus ketahanan pangan antaraktor di Kecamatan pemulutan Selatan kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan? Bagaimana pembentukan kuasa pengetahuan perempuan dalam ketahanan pangan keluarga yang dilakukan oleh para aktor di Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif, metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan *focus group discussion* (FGD). Informan penelitian ini antara lain: aparat pemerintah (kabupaten, kecamatan dan desa), tokoh masyarakat, pelaku usaha dan keluarga petani padi sawah lebak. Data yang dibutuhkan antara lain; program pemerintah terkait ketahanan pangan, pandangan tentang makna ketahanan pangan serta praktik diskursus pembentukan kuasa pengetahuan perempuan. Waktu penelitian mulai bulan September 2012 hingga Maret 2013 di Desa Ulak Aurstanding di Kecamatan Pemulutan Selatan kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontestasi diskursus pangan antaraktor

Pembentukan kuasa pengetahuan perempuan dalam ketahanan pangan keluarga merupakan hasil diskursus pangan keluarga yang diwacanakan oleh negara, nilai agama/adat (lokal) komunitas, dan pelaku usaha. Diskursus didefinisikan sebagai pernyataan yang memungkinkan sekelompok tanda sebagai obyek suatu diskursus menjadi ek-sis (Foucault, 2002), jenis pernyataan yang memungkinkan sesuatu menjadi muncul, baik berupa habitus, arena maupun benda-benda tertentu (Agusta, 2012). Wacana pangan keluarga dalam konteks negara, nilai

Tabel 1. Bentuk-bentuk diskursus ketahanan pangan antaraktor

No	Actor	Pembentukan strategi	Pembentukan konsep	Pembentukan subjek	Pembentukan objek
1.	Pemerintah	Membuat kebijakan, aturan, program, penyuluhan	Ketahanan pangan	Aparat pemerintah sebagai subyek mulai dari tingkat pusat, pemda, pemerintah desa dan satuan kerja lapangan	KK sebagai objek penerima program pertanian, perempuan objek kedua dalam program pertanian. Desa sebagai arena program percontohan dan program pertanian lainnya.
2.	Komunitas lokal	Tolong menolong antartetangga, Gotong royong, senasib sepenanggungan, sanak keluarga, menolong yang kurang mampu	Cukup makan setahun, tidak berhutang	laki-laki dan perempuan bekerja sama, sesuatu terjadi, misalnya punya anak pekerjaan rumah maka perempuan boleh tidak ikut bekerja di sawah.	Objek dari pangan adalah laki-laki dan perempuan, terutama anak.
3.	Pelaku usaha/swasta	Simpan pinjam, pembelian, penjualan, sewa tempat	Untung, rugi, modal	laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk meminjam dan menjual, tetapi laki-laki lebih sering berinteraksi dalam produksi dan simpan pinjam padi.	laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk meminjam dan menjual, tetapi laki-laki lebih sering berinteraksi dalam produksi dan simpan pinjam padi.

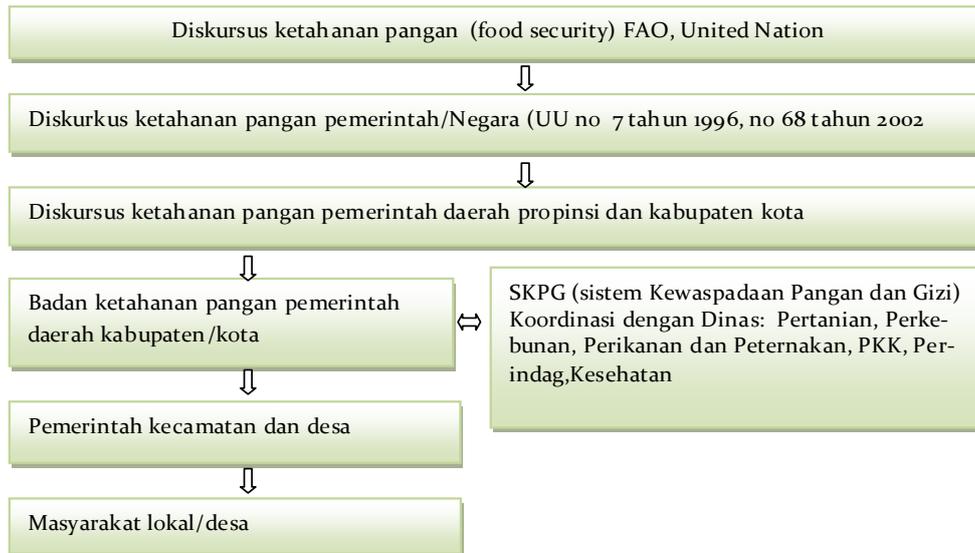
agama/adat (lokal) komunitas, dan pelaku usaha berbeda sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Bentuk-bentuk diskursus pangan bisa diamati melalui; pembentukan strategi, pembentukan konsep, pembentukan subyek, dan pembentukan objek sebagai berikut:

Negara memiliki diskursus pangan sebagai perpanjangan dari diskursus pangan dunia menjadikan FAO sebagai rujukan. Ketahanan pangan menjadi sebuah diskursus yang ditindaklanjuti dengan mengimplementasikannya melalui kebijakan dan program pembangunan. Sementara komunitas lokal sebagai pelaku pangan di tingkat praktik memiliki kebiasaan dan strategi sendiri dalam ketahanan pangan mereka, sehingga diskursus ketahanan pangan difahami sebagai bagaimana terpenuhinya pangan keluarga. Pelaku usaha pertanian melihat pangan dari perspektif yang lebih ekonomis yakni adanya pertukaran materi, modal dan keuntungan.

Strategi pemerintah

Diskursus pangan internasional/global mempengaruhi kondisi nasional dan berimbas pada kondisi lokal. Setiap propinsi dan kabupaten kota baik yang memiliki wilayah rawan pangan maupun tidak tetap membentuk badan ketahanan pangan. Dari sini terlihat bahwa terjadi proses penyeragaman sebagai akibat adanya diskursus global. Secara skematis dapat dilihat pada bagan berikut:

Strategi pemerintah untuk mendukung diskursus pangan setelah mengeluarkan undang-undang adalah membuat program-program yang berhubungan dengan ketahanan pangan. Program dari pusat (nasional) antara lain: penyediaan cadangan pangan, desa mandiri pangan, program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP). Selain itu pemerintah membentuk tim koordinasi untuk waspada terhadap kondisi rawan pangan dengan program sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG), yang melibatkan dinas dan instansi terkait seperti dinas: Pertanian, Perkebu-



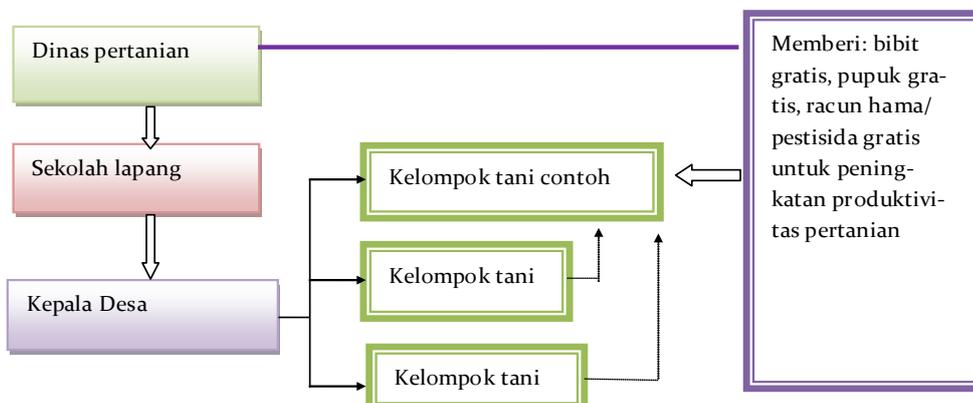
nan, Perikanan dan Peternakan, PKK, Perindag, Kesehatan. Pemerintah propinsi menindaklanjuti program tersebut dengan melakukan *sharing* kegiatan APBD₁. Selanjutnya pemerintah kabupaten menindaklanjuti dengan *sharing* kegiatan APBD₂.

Program ketahanan pangan di tingkat Kabupaten Ogan Ilir pada dasarnya sama dengan program nasional dan propinsi. Perbedaannya program nasional menggunakan dana APBN biasanya berupa bantuan sosial (*bansos*) dan dalam bentuk bantuan tunai. Sementara *sharing program* dengan APBD berupa barang yakni bibit, pupuk dan lainnya. Program dari badan ketahanan pangan dan dinas lain yang terkait dengan pangan, memberi pengaruh pada pengetahuan petani termasuk perempuan.

Petani padi diperkenalkan dengan teknik pertanian baru seperti pembibitan menggunakan media apung, menggunakan racun untuk membasmi rumput/gulma

sebelum menanam, menggunakan mesin traktor untuk mengolah sawah, menggunakan mesin perontok padi untuk memanen. Proses pengenalan pengetahuan pertanian melalui berbagai program penyuluhan pertanian. Sebagai contoh penyuluhan tentang penggunaan media apung untuk pembenihan padi, penggunaan racun rumput, penggunaan pupuk kimia, dan cara menggunakan mesin traktor dan perontok padi.

Selain itu dibuat program sekolah lapang pertanian, petani diminta membentuk kelompok masing-masing kelompok terdiri dari 25 orang. Salah satu kelompok dijadikan percontohan untuk petani lain. Kelompok percontohan diberi pupuk gratis, bibit gratis dan racun hama untuk mengerjakan sawah mereka. Diharapkan dengan keberhasilan pertanian kelompok percontohan maka kelompok lain akan menirunya. Program ini utamanya dimaksudkan untuk peningkatan produktivitas pertanian dan untuk mewu-



judkan ketahanan pangan keluarga.

Dengan pembentukan kelompok tani percontohan, pemerintah mengharapkan terjadi transfer pengetahuan dan pengalaman terhadap petani dari kelompok lain. Strategi ini ditempuh untuk meningkatkan produksi pangan yang selanjutnya dapat mewujudkan ketahanan pangan di tingkat keluarga petani padi. Peserta kelompok tani adalah kepala keluarga, mayoritas laki-laki. Karenanya transfer pengetahuan pertanian lebih banyak dinikmati laki-laki daripada perempuan. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa inovasi baru di bidang pertanian lebih cepat di akses laki-laki, baru setelah pelaksanaan para suami memberi tahu kepada istrinya.

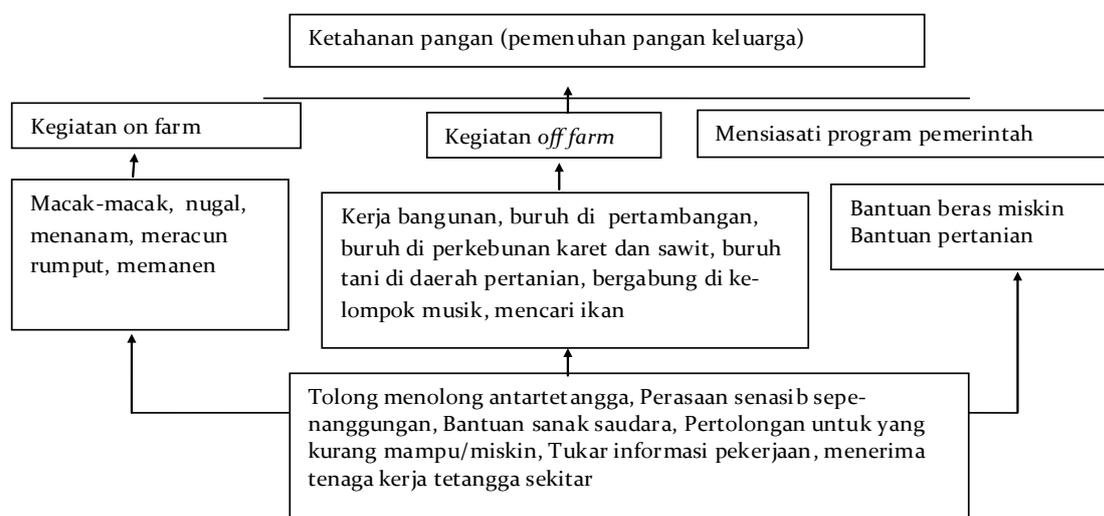
Strategi komunitas

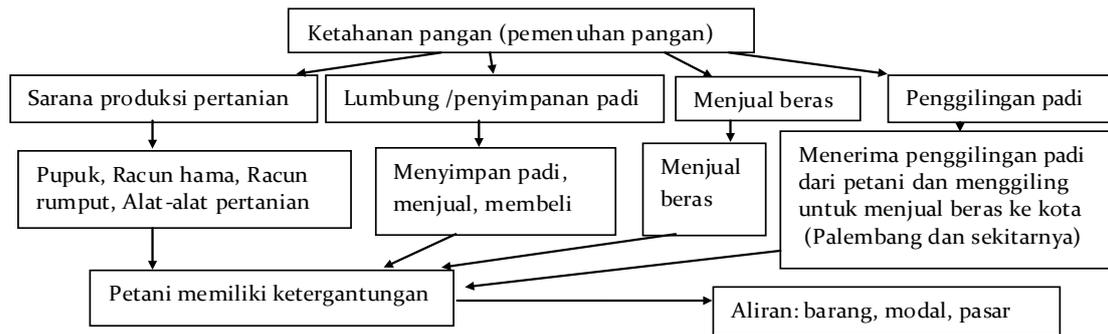
Sementara itu, komunitas petani padi sawah lebak memiliki strategi tersendiri dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka. Strateginya antara lain menjaga rasa saling tolong menolong di antara tetangga dekat, karena merasa senasib sepenanggungan. Pada saat ada keluarga tidak mampu, memerlukan uang untuk kebutuhan pangan, maka tetangga dekat memberi pinjaman. Pinjaman tersebut dibayar dengan tenaga pada saat musim tanam dan panen. Saling tolong menolong juga menjadi mekanisme bagi penyelesaian persoalan pangan pada komunitas ini. Seperti penuturan seorang informan bahwa meskipun ia janda hidup sendirian karena tidak memiliki anak tetapi tetangganya memberi pinjaman uang saat

ia membutuhkan untuk membeli beras dan kebutuhan makan lainnya. Pada saat musim tanam dan panen tiba maka ia akan membayar hutang tersebut dengan tenaga yang dimilikinya.

Komunitas petani padi sawah lebak mempunyai cara tersendiri dalam mensikapi berbagai program yang masuk. Di antaranya ketika beras miskin digulirkan maka pengaturan pembagiannya diserahkan pada desa, dan desa membagi kepada seluruh keluarga. bagi yang merasa memerlukan akan mendapatkan bagian dan yang merasa mampu maka akan malu jika mengambil beras miskin tersebut. Tidak hanya beras miskin tetapi juga program pertanian sekolah lapang, di mana terdapat bantuan pada kelompok percontohan berupa bibit, pupuk Keluarga luas masih memberi peran bagi terpenuhinya kebutuhan pangan keluarga miskin. Pada saat tidak punya uang sama sekali untuk makan, sementara sudah banyak utang kepada tetangga dekat maka mereka pergi kepada sanak saudara untuk meminjam bantuan. Bantuan dari sanak saudara ini biasanya bukan dalam bentuk hutang tetapi pemberian. Sanak kerabat melakukan gotong royong membantu keluarga yang kurang mampu. Kondisi ini membuat keluarga tidak mampu masih bisa memenuhi kebutuhan pangan keluarga mereka

Hal ini menunjukkan di tingkat komunitas terdapat mekanisme yang memungkinkan keluarga kurang mampu tetap bisa makan sehari-hari; dari kedermawanan saudara dekat maupun saudara yang ting-





gal jauh dari tempat tinggal mereka. Secara lebih jelas strategi komunitas dapat dilihat pada bagan berikut:

Strategi pelaku usaha

Pelaku usaha pertanian memiliki tujuan ekonomis atas diskursus ketahanan pangan. Dalam banyak kasus mereka mendapatkan keuntungan di antaranya; dalam penyediaan sarana produksi pertanian, penampungan beras/padi, pembelian dan penjualan padi/beras, dan sebagai mitra pemerintah daerah dalam program ketahanan pangan.

Melembagakan dan mengelola diskursus pangan keluarga

Para aktor berupaya melembagakan dan mengelola diskursus melalui berbagai aturan. Aturan tersebut sengaja diciptakan agar bisa mencapai tujuan. Aktor akan menentukan dan mengatur siapa saja sebagai objek yang hendak dituju. Misalnya untuk program pemerintah maka akan dibatasi siapa menerima program tersebut. Setelah itu akan dilanjutkan dengan membuat aturan internal dalam bentuk aturan perundangan dan kebijakan tertentu dalam program tersebut. Kemudian untuk mengelola diskursus maka akan ada aturan pengelolaan kekuasaan.

Tabel Pelembagaan dan pengelolaan diskursus pangan antaraktor

No.	Actor	Aturan penyisihan	Aturan internal	Aturan pengelolaan kekuasaan
1.	Pemerintah	mengatur siapa yang dikenai program, dilibatkan, diberi bantuan dan siapa yang tidak	kebijakan, undang-undang, peraturan, program	melakukan penyisihan sosial dengan membentuk kelompok tani dan bukan kelompok tani, yang diberi bantuan dan yang tidak, menciptakan kelompok doktrinal seperti penyuluh lapangan, badan ketahanan pangan, dinas pertanian
2.	Komunitas lokal	mengatur jenis pekerjaan yang sebaiknya dilakukan laki-laki dan perempuan,	aturan adat, nilai agama, kebiasaan untuk mengatur pola hubungan dalam keluarga	ritual atau kebiasaan setelah panen dan sebelum panen, penyisihan antara keluarga mampu dan tidak mampu dalam bentuk tidak mau menerima bantuan.
3.	Pelaku usaha	aturan main dan perjanjian simpan pinjam	prinsip kepercayaan (<i>trust</i>), aturan penyimpanan dan pengambilan padi, harga jual	ritual mendatangi sawah yang sedang panen untuk menjaga agar padi dijual dan disimpan di lumbung ritual mendatangi sawah yang sedang panen untuk menjaga agar padi dijual dan disimpan di lumbung

No.	Aktor	Pendisiplinan	Contoh kasus
1.	Pemerintah	<i>Reward dan punishment</i>	Memberikan penghargaan kepada kelompok tani atau desa yang berhasil meningkatkan produktivitas pertanian dengan memberi hadiah dan program baru. Di sisi lain juga akan menyetop program tertentu jika tidak berhasil menjalankannya.
2.	Komunitas lokal	Sanksi sosial	Memberikan sanksi sosial berupa tidak akan menghadiri undangan jika ada individu yang tidak mengindahkan aturan, kebiasaan dalam komunitas
3.	Pelaku usaha	Boleh tidaknya meminjam uang & sarana produksi pertanian	Petani tidak diberi pinjaman uang maupun barang jika belum melunasi hutangnya pada musim panen berikutnya.

Pengelolaan diskursus juga dilakukan dengan proses pendisiplinan. Pendisiplinan merupakan salah satu cara pengaturan internal diskursus. Setiap aktor yang mengusung diskursus berusaha melakukan pendisiplinan diskursusnya dengan menggunakan cara-cara tersendiri. Berikut tabel kontestasi pendisiplinan antaraktor yang terjadi dalam penelitian.

Interaksi antaraktor dalam ketahanan pangan keluarga

Pada dasarnya masing-masing aktor memiliki tujuan memberikan kemudahan dalam pemenuhan pangan keluarga. Pemerintah dengan diskursus ketahanan pangannya mengasumsikan bahwa dengan berbagai program termasuk peningkatan pengetahuan perempuan menginginkan agar masyarakat dan keluarga petani meningkat kesejahteraannya dari waktu ke waktu. Begitu juga dengan komunitas, selama ini nilai-nilai dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat berupaya menopang terpenuhinya pangan keluarga di komunitas sawah lebak. Sementara pelaku usaha dengan usaha di bidang pengadaan sarana produksi pertanian dan penyediaan lumpung padi yang membeli dan menjual padi/beras juga mempermudah petani memperoleh pangan.

Meskipun masing-masing aktor memiliki diskursus yang dikembangkan namun kenyataannya dalam praktiknya terjadi interaksi sinerhis antaraktor dalam arena ketahanan pangan pada keluarga petani

padi sawah lebak. Gambaran interaksi dapat dilihat sebagai berikut:



Diskursus pemerintah (pusat, propinsi dan kabupaten) dipraktikan melalui interaksi dengan pemerintah desa dan pelaku usaha. Berbagai program ketahanan pangan dilaksanakan bisa sampai ke tingkat keluarga melalui interaksi pemerintah desa dengan pemerintah antara lain: pembentukan kelompok tani, penyaluran bantuan kredit dan lainnya. Interaksi pemerintah dengan pelaku usaha terkait pengadaan sarana produksi dan pembelian gabah untuk cadangan pangan desa. Interaksi komunitas lebih sering dilakukan dengan pemerintah desa dan pelaku usaha. Program pemerintah pusat dan daerah bisa sampai ke komunitas dan keluarga melalui perantara pemerintah desa dan pelaku usaha.

Jika dikaji, diskursus ketahanan pangan yang diusung komunitas relatif lebih sering dan lebih utama dipraktikan oleh keluarga dan perempuan petani padi sawah

lebak. Sementara diskursus pemerintah bersifat komplementer dan diskursus pelaku usaha bersifat *supporting*. Hal ini bisa difahami karena pada keluarga petani padi termasuk perempuan telah bertahun-tahun hidup dalam komunitas dan secara geografis letak lokasi relatif terisolir. Transportasi keluar kecamatan dijangkau dengan menggunakan *ketek*, kemudian naik ojek dan angkot. Beberapa tahun terakhir baru dibuka dan diperbaiki akses jalan darat yang menghubungkan desa ke kota terdekat yakni Kota Kayu Agung kabupaten OKI.

Pembentukan kuasa pengetahuan perempuan

Kuasa pengetahuan perempuan dibentuk oleh aturan main yang diusung oleh para aktor. Masing masing aktor memiliki cara tersendiri bagaimana mempraktikkan diskursusnya. Mereka berinteraksi dan me-

lakukan negosiasi dengan kaum perempuan dengan menggunakan strategi untuk menyebarkan pengetahuan. Dalam teori diskursus kekuasaan dapat dipandang sebagai suatu strategi untuk memelihara hubungan antara yang bisa dikatakan dan yang bisa dilihat (Agusta, 2012). Sementara itu, pengetahuan tidak dapat muncul tanpa kekuasaan. Kekuasaan disini tidak bersifat dimiliki atau selalu represif, melainkan bersifat dipraktekkan.

Pengetahuan perempuan terkait pemenuhan pangan keluarga merupakan pengetahuan yang dimiliki perempuan yang bersumber dari para aktor. Secara turun temurun komunitas memberi pengetahuan bagaimana memasak, mencari dan mengolah bahan alam di sekitarnya yang bisa dijadikan pangan keluarga, dan memperoleh pendapatan dengan pengetahuan dan ke-trampilan melalui sosialisasi dari keluarga

Tabel. Elastisitas pengetahuan perempuan oleh para aktor

No.	Aktor	Elastisitas pengetahuan perempuan	Contoh kasus
1.	Negara	Tarik ulur pengetahuan	Pengetahuan diberikan melalui penyuluhan pada perempuan tertentu karena adanya proyek tertentu setelah program habis tidak ada tindak lanjut
2.	Keluarga luas (nilai agama/adat)	Memberikan arahan mana yang seharusnya tetapi juga memberi kelonggaran	Pengetahuan disosialisasikan sebagai tanggung jawab perempuan tetapi ada pemakluman-pemakluman karena situasi dan kondisi tertentu
3.	Pelaku usaha	Tidak bersifat mengikat pelanggan, memberi kebebasan kepada petani	Memberikan informasi hubungan yang tidak mengikat sehingga perempuan / petani bisa menjual dan membeli sesuai dengan keinginan mereka.

Kategori perempuan	Pengetahuan pemerintah	Pengetahuan komunitas	Pengetahuan swasta
Kelas atas	Mengakses dengan mengikuti penyuluhan dan berbagai program lainnya	Mengakses dan bahkan melanggengkan pengetahuan komunitas	Tidak mengakses semua dilakukan suaminya
Kelas menengah	Mengakses dengan mengikuti penyuluhan dan berbagai program sekaligus mensiasati program	Mengakses pengetahuan tetapi juga mensiasati bahkan melakukan resistensi terhadap pengetahuan nilai adat dan agama	Sangat mengakses bahkan dalam beberapa hal menjadi mitra pelaku usaha
Kelas bawah	Tidak mengakses karena keterbatasan kesempatan, waktu, informasi dan jaringan	Mengakses pengetahuan komunitas dan memanfaatkannya demi pemenuhan pangan keluarga	Mengakses dan memanfaatkannya untuk strategi bertahan hidup

inti maupun keluarga luas. Dalam komunitas, perempuan memang dikonstruksikan secara sosial sebagai pencari nafkah kedua setelah suami.

Pembentukan pengetahuan perempuan oleh pemerintah dilakukan melalui penyuluhan peningkatan pendapatan serta ketrampilan mengolah dan memanfaatkan makanan. Sementara pelaku usaha memberikan kebebasan baik laki-laki maupun perempuan untuk menjual maupun membeli padi maupun beras ke lumbung mereka.

Tampaknya pengetahuan yang diberikan oleh setiap aktor tidak berlaku ketat dan kaku. Ada pasang surut dan prakondisi yang menyebabkan pengetahuan perempuan bisa bertambah dan bisa dipraktikkan. Namun ada juga perempuan yang memiliki pengetahuan stagnan dan kurang mampu mempraktekan pengetahuannya juga karena situasi dan kondisi tertentu. Hal ini tidak terlepas dari bagaimana para aktor melakukan tarik ulur dalam memberikan dan meningkatkan pengetahuan perempuan. Berikut tabel tentang elastisitas pengetahuan perempuan.

Perempuan akan memiliki kuasa atas pengetahuannya ketika ia mampu mempraktikkan pengetahuannya. Karenanya hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan di sini ditentukan oleh suatu situasi strategis dalam memelihara hubungan antara apa yang bisa dikatakan dan yang bisa dilihat. Terdapat perbedaan antara perempuan dalam memperoleh pengetahuan, di antara perempuan kelas atas, kelas menengah dan kelas bawah. Perempuan kelas atas dan kelas menengah relatif memiliki akses dalam memperoleh pengetahuan. Hal ini karena mereka memiliki waktu luang, kesempatan, informasi dan jaringan yang lebih banyak daripada perempuan kelas bawah. Berikut

tabel mengenai perbedaan pengetahuan antar perempuan berdasarkan kelas sosial.

SIMPULAN

Terdapat tiga aktor utama dalam diskursus ketahanan pangan yakni pemerintah, komunitas dan pelaku usaha. Masing-masing berupaya mempraktikkan diskursusnya pada keluarga petani. Ternyata dalam mempraktekkan diskursus ini terjadi interaksi antaraktor yang saling bersinergi. Namun diskursus komunitas yang paling dominan dipraktikkan oleh keluarga sedangkan diskursus pemerintah sebagai pelengkap dan diskursus pelaku usaha sebagai pendorong. Pembentukan kuasa pengetahuan perempuan oleh para aktor bersifat lentur/elastik dan terdapat perbedaan akses pembentukan pengetahuan perempuan antar kelas sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, I. 2012. Foucault, Pedesaan dan Pertanian di Indonesia. Makalah Seminar. IPB
- Carr, R.E. 2006. *Postmodern conceptualizations, modernist applications: Rethinking the role of society in food security*. Food Policy 31 (2006) 14-29. Elsevier. www.sciencedirect.com
- Denzin, N.K. dan Y.S. Lincoln. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Edisi Bahasa Indonesia. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Indonesia.
- Foucault, M. 2002. *Wacana Kuasa/Pengetahuan*. Terjemahan Power/Knowledge. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Nanama, S., & Frongillo, A.E. 2012. Women's rank modifies the relationship between household and women's food insecurity in complex households in northern Burkina Faso. Food Policy 37 (2012) 217-225. Elsevier Ltd
- Noor, M. 2007. *Rawa Lebak Ekologi, Pemanfaatan, dan Pengembangannya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Yunita. 2011. *Strategi Peningkatan Kapasitas Petani Padi Sawah Lebak menuju Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Kabupaten Ogan Ilir dan OKI Propinsi Sumatera Selatan*. Disertasi. IPB